

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi dengan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ” ini ditulis oleh Anjrah Ayu Lestari, NIM 126103213301, dengan pembimbing/promotor Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Imam Al-Mawardi, Pilkada, Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, Kepemimpinan Islam, Legitimasi, Demokrasi Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya integritas dan kapasitas moral calon kepala daerah. Dalam menghadapi persoalan tersebut, pemikiran klasik Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjadi relevan untuk dikaji, khususnya terkait konsep Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, legitimasi kekuasaan, dan kriteria kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya Imam Al-Mawardi menekankan bahwa seorang pemimpin dipilih melalui bai’at oleh *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*, yaitu sekelompok tokoh berilmu dan berwibawa dalam masyarakat. Pemimpin ideal menurut Al-Mawardi harus beragama Islam, adil, cakap dalam urusan dunia dan agama, serta memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum syariat. Sementara itu, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas demokrasi, dengan dasar hukum konstitusional seperti UUD 1945 dan UU No. 10 Tahun 2016. Kepala daerah dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Perbedaan mendasar terletak pada sumber legitimasi kekuasaan: Al-Mawardi menekankan legitimasi agama melalui elite umat, sedangkan Indonesia menekankan kedaulatan rakyat. Meski berbeda dalam mekanisme dan dasar hukum, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan untuk menciptakan kepemimpinan yang adil dan menyejahterakan masyarakat.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah : (1) Bagaimana pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan dan sistem pemilihan kepala daerah; (2) Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia; (3) Bagaimana relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem kepemimpinan islam dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif dan statute approach. Sumber data terdiri dari data primer seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, peraturan perundang-undangan Pilkada, serta data sekunder yang berasal dari buku, atau jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan tujuan membandingkan konsep pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dengan sistem pilkada di Indonesia, serta mengidentifikasi nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang masih relevan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem kepemimpinan daerah di era modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan dalam karya *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, berlandaskan syariat Islam, dan dipilih oleh sekelompok orang yang ahli (*Ahl al-Hall wa al-'Aqd*). Pemimpin tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui proses bai'at dari tokoh-tokoh terkemuka yang dipercaya memiliki integritas dan kecakapan. Konsep ini bersifat teokratis dan elitistik. (2) Sistem Pilkada di Indonesia bersifat demokratis dan berbasis kedaulatan rakyat, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional, di mana pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (3) Meskipun terdapat perbedaan sistematis antara sistem pemilihan kepala daerah dalam pemikiran Al-Mawardi dan sistem demokrasi modern di Indonesia, terdapat titik temu dalam hal nilai-nilai dasar kepemimpinan: keadilan, integritas, legitimasi, dan tanggung jawab publik. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, integritas, legitimasi, dan tanggung jawab publik tetap relevan untuk diterapkan dalam Pilkada. Oleh karena itu, pemikiran Al-Mawardi dapat menjadi pijakan normatif dalam memperkuat moralitas politik dan kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Sistem pilkada di Indonesia ini memiliki sistem yang bersifat terbuka dan menjamin partisipasi politik masyarakat. Meskipun berbeda dalam mekanisme dan landasan filosofis, terdapat titik temu antara keduanya dalam hal tujuan pemerintahan, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas dalam kehidupan bernegara.

ABSTRACT

This undergraduate thesis, titled “*The Relevance of Imam Al-Mawardi’s Thought to the Regional Head Election System in Indonesia*,” was written by Anjrah Ayu Lestari, Student ID 126103213301, under the supervision of Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Keywords: Imam Al-Mawardi, Pilkada, Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, Islamic Leadership, Legitimacy, Indonesian Democracy.

Regional Head Elections (Pilkada) are a tangible form of democratic implementation in Indonesia, aimed at realizing governance based on popular sovereignty. However, in practice, Pilkada still faces various challenges such as money politics, low public participation, and the weak integrity and moral capacity of candidates. In addressing these issues, the classical thought of Imam Al-Mawardi in *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* becomes relevant, especially regarding the concepts of *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*, legitimacy of power, and leadership criteria. Al-Mawardi emphasized that a leader should be appointed through *bai’at* by *Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*, a group of knowledgeable and respectable individuals in society. An ideal leader, according to Al-Mawardi, must be a Muslim, just, competent in both worldly and religious affairs, and capable of upholding Islamic law. Meanwhile, Indonesia’s regional election system is conducted directly by the people based on democratic principles, with constitutional legal foundations such as the 1945 Constitution and Law No. 10 of 2016. Regional heads are elected for a five-year term and may be re-elected once. The fundamental difference lies in the source of legitimacy: Al-Mawardi emphasizes religious legitimacy through elite consensus, whereas Indonesia emphasizes popular sovereignty. Despite differences in mechanism and legal basis, both share the goal of establishing just and welfare-oriented leadership.

This research addresses the following questions: (1) What are Imam Al-Mawardi’s views on government and the selection of leaders? (2) How is the regional head election system implemented in Indonesia? (3) What is the relevance of Al-Mawardi’s Islamic leadership concept to Indonesia’s regional election system?

This study uses a library research method with a comparative and statute approach. Data sources include primary texts such as *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* and Pilkada-related regulations, as well as secondary sources like books, journals, and other literature. Data were analyzed descriptively and comparatively to examine leadership selection concepts in Al-Mawardi’s thought and Indonesia’s electoral system, while identifying relevant principles that can inform the development of modern regional leadership.

The results of the study show that : (1) Imam Al-Mawardi's thoughts on the system of governance, as presented in his work *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, emphasize the importance of just leadership based on Islamic law (sharia), selected by a group of qualified individuals known as *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Leaders are not chosen directly by the people, but rather through a *bai'at* (allegiance) process conducted by prominent figures who are deemed to possess integrity and competence. This concept is theocratic and elitist in nature. (2) The regional head election (Pilkada) system in Indonesia is democratic and based on popular sovereignty. Regional leaders are directly elected by the people through general elections, as regulated by Law No. 10 of 2016, which amends Law No. 1 of 2015 on the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning the election of governors, regents, and mayors into law. This system follows the principles of constitutional democracy. (3) Although there are systematic differences between Al-Mawardi's concept of leadership selection and Indonesia's modern democratic system, there are commonalities in terms of core leadership values: justice, integrity, legitimacy, and public accountability. These foundational principles remain relevant and applicable to regional elections in Indonesia. Therefore, Al-Mawardi's thought can serve as a normative foundation to enhance political morality and the quality of local leadership. Indonesia's regional election system is characterized by openness and guarantees citizen political participation. Despite differing in mechanisms and philosophical foundations, both systems share a common goal of governance: to establish justice, public welfare, and stability in state life.

خلاصة

الأطروحة التي تحمل عنوان "أهمية فكر الإمام الماوردي في نظام انتخاب الرؤساء الإقليميين في إندونيسيا" كتبها أنجرة أبو لستاري ، NIM 126103213301 ، مع مشرفة / مروجة الأستاذ الدكتور عفتين نور ، M.Ag.

الكلمات المفتاحية: الإمام الماوردي، الانتخابات الإقليمية، أهل الحل والعقد، القيادة الإسلامية، الشرعية، الديمقراطية الإندونيسية.

يعد انتخاب الرؤساء الإقليميين (Pilkada) أحد الأشكال الملموسة لتطبيق الديمقراطية في إندونيسيا ، والتي تهدف إلى تحقيق حكومة قائمة على سيادة الشعب. ومع ذلك، من الناحية العملية، لا يزال تنفيذ الانتخابات الإقليمية يواجه تحديات مختلفة، مثل ممارسة السياسة المالية، وانخفاض المشاركة العامة، وضعف النزاهة والقدرة الأخلاقية للمرشحين الرئيسيين الإقليميين. في مواجهة هذه المشكلة ، الفكر الكلاسيكي للإمام الماوردي في *الأحكام السلطانية* أن تصبح ذات صلة بالدراسة ، خاصة فيما يتعلق بمفهوم أهل الحل والعقد ، وشرعية السلطة ، ومعايير القيادة. مفهوم القيادة في *الأحكام السلطانية* يؤكد عمل الإمام الماوردي على أن القائد يتم اختياره من خلال البيات من قبل *أهل الحل والعقد* ، وهي مجموعة من الشخصيات المطلعة والموثوقة في المجتمع. ووفقا للماوردي، يجب أن يكون القائد المثالي مسلما، وعادلا، وقادرا على شؤون العالم والدين، ولديه القدرة على تطبيق الشريعة الإسلامية. وفي الوقت نفسه ، يتم تنفيذ نظام انتخاب الرؤساء الإقليميين في إندونيسيا مباشرة من قبل الشعب على أساس المبادئ الديمقراطية ، مع أسس قانونية دستورية مثل دستور عام 1945 والقانون رقم 10 لعام 2016. يتم انتخاب الرؤساء الإقليميين لمدة خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة. يكمن الاختلاف الأساسي في مصدر شرعية السلطة: يؤكد الماوردي على شرعية الدين من خلال نخبة الأمة، بينما تؤكد إندونيسيا على سيادة الشعب. على الرغم من اختلافهما في الآلية والأساس القانوني ، إلا أنهما لهما أوجه تشابه في هدف خلق قيادة عادلة ورفاهية المجتمع.

يحتوي هذا البحث على صياغة للمشاكل: (1) كيف يفكر الإمام الماوردي في نظام الحكم ونظام انتخابات رؤساء المناطق. (2) كيف يتم نظام انتخاب الرؤساء الإقليميين في إندونيسيا؟ (3) كيف تربط أفكار الإمام الماوردي بنظام القيادة الإسلامية بنظام انتخابات رؤساء المناطق في إندونيسيا؟

تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث الأدبيات مع نهج مقارن ونهج قانوني. يتكون مصدر البيانات من بيانات أساسية مثل *الأحكام السلطانية* ، قوانين ولوائح بيلكادا ، وكذلك البيانات الثانوية المستمدة من الكتب والمجلات والأبيات الأخرى المتعلقة بموضوع البحث. تم تحليل البيانات بطريقة وصفية مقارنة بهدف مقارنة مفهوم اختيار القائد وفقا للماوردي بنظام الانتخابات الإقليمية في إندونيسيا ، وكذلك تحديد القيم أو المبادئ التي لا تزال ذات صلة ويمكن استخدامها كاعتبار في تطوير أنظمة القيادة الإقليمية في العصر الحديث.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) أفكار الإمام الماوردي في نظام الحكم في عمله *الأحكام السلطانية* التأكيد على أهمية القيادة العادلة، المبنية على الشريعة الإسلامية، والمنتخبة من قبل مجموعة من الخبراء (*أهل الحل والعقد*). لا يتم انتخاب القادة مباشرة من قبل الشعب ، ولكن من خلال عملية البيات من شخصيات بارزة يعتقد أنها تتمتع بالنزاهة والقدرة. هذا المفهوم ثيوقراطي ونخبوي. (2) نظام الانتخابات الإقليمي في إندونيسيا ديمقراطي وقائم على سيادة الشعب، ويستند نظام انتخاب رؤساء الأقاليم في إندونيسيا إلى مبدأ الديمقراطية الدستورية، حيث يتم انتخاب القادة الإقليميين مباشرة من قبل الشعب من خلال الانتخابات العامة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نص اللوائح الحكومية بدلا من القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن انتخاب المحافظين. الحكام ورؤساء البلديات يصبحون قوانين (3) على الرغم من وجود اختلافات منهجية بين نظام انتخاب الرؤساء الأقاليم في فكر الماوردي والنظام الديمقراطي الحديث في إندونيسيا، إلا أن هناك نقطة مشتركة من حيث القيم القيادية الأساسية: العدالة والنزاهة والشرعية والمسؤولية العامة. لا تزال المبادئ الأساسية مثل العدالة والنزاهة والشرعية والمسؤولية العامة ذات صلة ليتم تطبيقها في الانتخابات الإقليمية. لذلك، يمكن أن يكون تفكير الماوردي موطئ قدم معياري في تعزيز الأخلاق السياسية والصفات القيادية على المستوى المحلي. نظام الانتخابات الإقليمي في إندونيسيا لديه نظام مفتوح ويضمن المشاركة السياسية للشعب. على الرغم من اختلافهما في الآلية والأساس الفلسفي ، إلا أن هناك نقطة مشتركة بين الاثنين من حيث هدف الحكومة ، وهي تحقيق العدالة والرفاهية المجتمعية والاستقرار في حياة الدولة.